

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada , Jakarta ,2004 hal 19.
- Barnett, H., & Matkin, G. (2010). *Legal Certainty and Business Transactions*. Journal of Business Law.
- Fama, E. F. & Jensen, M. C. (1983). *Separation of Ownership and Control*. Journal of Law and Economics, 26(2), 301-325.
- Fama, E.F. & Jensen, M.C. (1983). *Separation of Ownership and Control*. Journal of Law and Economics, 26(2), 301-325.
- Frank, M. (2009). *Principles of Legal Certainty in Modern Governance*. Law Review.
- Handayani dan Sulistiyono, “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas,” hlm. 373.
- Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 479
- Harvard Business Review. (2009). *The Icarus Paradox: How Exceptional Companies Bring About Their Own Downfall*.
- Hidayat, R. (2017). *Implikasi Hukum dan Ekonomi Rendahnya Partisipasi Pemegang Saham dalam RUPS*. Jurnal Ekonomi & Hukum.
- Hukumonline. (2023). *Penerapan Sistem Antikorupsi di BUMN dan Tantangannya*.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Tri Sulistiyono, (2015), “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22 No. 3, hlm. 370.
- JDIH Kemenkumham, **Permenkumham No. 21/2021** tentang Pemberitahuan/Persetujuan AD
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1335 tentang batal demi hukum.
- Levy, P. F. (2001). *The Nut Island Effect: When Good Teams Go Wrong*. Harvard Business Review.

- Lim, K. (2016). *Corporate Governance and Legal Certainty in Asia*. Asian Business Review.
- Mallor, J. P., Barnes, A. J., Bowers, T., & Langvardt, A. W. (2013). *Business Law: The Ethical, Global, and E-Commerce Environment*. McGraw-Hill Education.
- Moore, K. (2013). Strategy Without Execution Is Hallucination! *Forbes*.
- Munir Fuady, (2020), *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan IV (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 166
- Munir Fuady, (2020), *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. IV (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 165–167.
- Nugroho, B. (2019). *Pengendalian Suara dalam RUPS: Perspektif Hukum dan Strategis*. Jurnal Ekonomi dan Hukum.
- OECD (2023), *G20/OECD Principles of Corporate Governance*, OECD Publishing, Paris.
- OECD, 2015, *Principles of Corporate Governance*, OECD Publishing, , Bagian II dan V
- OECD, 2023, *Corporate Governance Factbook*, Paris: OECD Publishing, , hlm. 87; International Finance Corporation (IFC), 2022, *Strengthening Governance for Investment Climate Reform*, Washington, D.C., hlm. 44.
- OECD, *G20/OECD Principles of Corporate Governance*, OECD Publishing, 2015.
- OECD. (2003). *Recommendation of the Council on OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service*.
- OECD. (2004). *Managing Conflict of Interest in the Public Service: OECD Guidelines and Country Experiences*. OECD Publishing.
- OECD. *Principles of Corporate Governance - OECD Legal Instruments*
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022, *Laporan Tahunan Stabilitas Sistem Keuangan*, hlm. 112.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik.*

Otoritas Jasa Keuangan, **POJK tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif**, OJK.go.id

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.* Jakarta.

Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Audit

Pasal 88 dan 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Penerapan manajemen risiko strategis menurut POJK No. 42/2024

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pendaftaran AD.

Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4). Paragraf 5 Kuorum Kehadiran Musyawarah Pasal 17

Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 47/2020 tentang Sanksi Administratif oleh OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek.

POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 6–10.

- POJK Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga
- Putri, C. (2021). *Kuorum dalam RUPS dan Strategi Politik Internal: Studi Empiris pada Perusahaan Terbuka*. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 15(3), 112-130.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 123/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., pertimbangan hukum menyatakan bahwa pembatalan keputusan RUPS juga membatalkan akibat hukum yang bersumber dari keputusan tersebut.
- Rachman, A. (2019). *Tantangan Partisipasi Pemegang Saham dalam RUPS di Indonesia: Studi Kasus pada Perusahaan Publik*.
- Rachmat Syafei, (2020), “Reformasi Struktur Kelembagaan dalam Pengawasan Korporasi,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11 No. 2, hlm. 187.
- Rachmat Syafei, (2021), “Tantangan Implementasi e-RUPS dalam Perspektif Perlindungan Pemegang Saham,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11 No. 2 , hlm. 183–185.
- Rahmawati, L. (2020). *Digitalisasi RUPS dan Transformasi Tata Kelola Perusahaan*. *Jurnal Manajemen Teknologi*.
- Sanksi administratif oleh OJK sesuai POJK No. 47/2020
- Setiawan, D. (2018). *Keamanan Siber dalam Implementasi e-RUPS: Tantangan dan Peluang*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*.
- Siregar, A. (2018). *Partisipasi Pemegang Saham dalam RUPS: Tantangan dan Solusi*. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Siregar, A., & Hadi, B. (2020). *Efektivitas e-RUPS dalam Meningkatkan Pencapaian Kuorum pada Rapat Umum Pemegang Saham*. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 12(1), 45-67.
- Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.43
- Surat Edaran OJK No. S-124/D.04/2020 tentang Sistem eASY.KSEI.
- Sutan Remy Sjahdeini, (2014), *Hak Pemegang Saham Minoritas*, (Jakarta: UI Press), hlm. 233–234.
- Sutan Remy Sjahdeini, (2016), *Hukum Perusahaan dan Kegiatan Usaha Perusahaan di Pasar Modal* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), hlm. 211–213.

Tricker, B. (2015). *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*. Oxford University Press.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 152 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 152; Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020; KUHP Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen.

Use Attendance Reports in Teams Meetings, dokumentasi resmi Microsoft 365

World Bank, 2020, *Corporate Governance Reform Toolkit*, Washington, D.C.: World Bank Group, , hlm. 55.

World Bank. (2010). *Shareholder rights, transparency key to capital market development: new WB report*.

World Bank. *Indonesia Corporate Governance Manual*.

World Bank. Indonesia Corporate Governance ROSC Report. Washington DC: World Bank Group, 2021; Badan Pemeriksa Keuangan. IHPS I Tahun 2022. Jakarta: BPK RI, 2022.

Yahya Harahap, (2007), *Hukum Perseroan Terbatas: Undang-Undang Nomor 40*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 482

Yahya Harahap, (2021), *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 486–487.

Yahya Harahap, (2021), *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 475